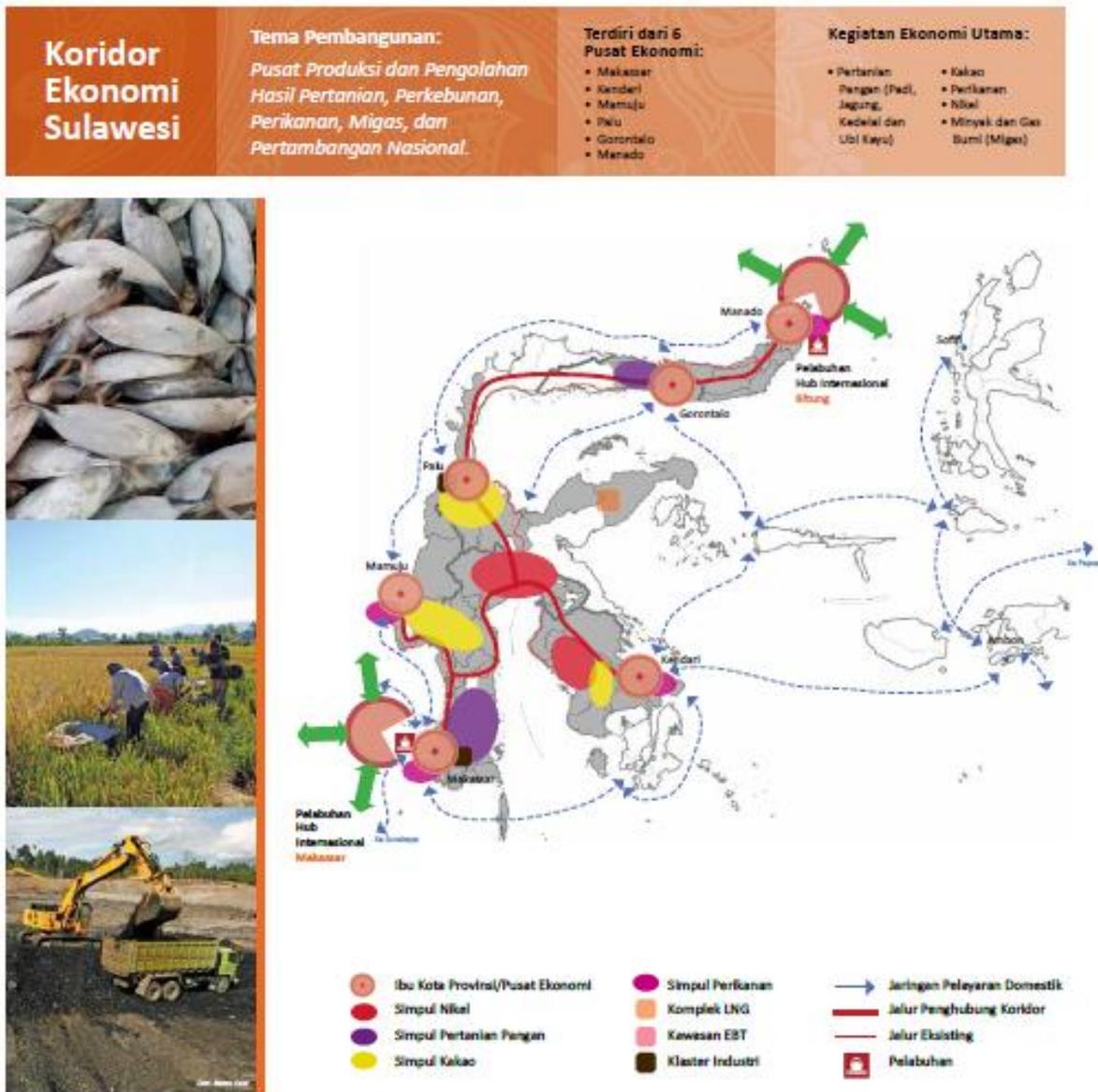




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 183 -



E. Koridor Ekonomi Sulawesi

1. Overview Koridor Ekonomi Sulawesi

Koridor Ekonomi Sulawesi memiliki tema Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas, dan Pertambangan Nasional.

Koridor ini diharapkan menjadi garis depan ekonomi nasional terhadap pasar Asia Timur, Australia, dan Amerika. Koridor Ekonomi Sulawesi memiliki potensi tinggi di bidang ekonomi dan sosial dengan kegiatan-kegiatan unggulannya. Meskipun demikian, secara umum terdapat beberapa hal yang harus dibenahi di Koridor Ekonomi Sulawesi:

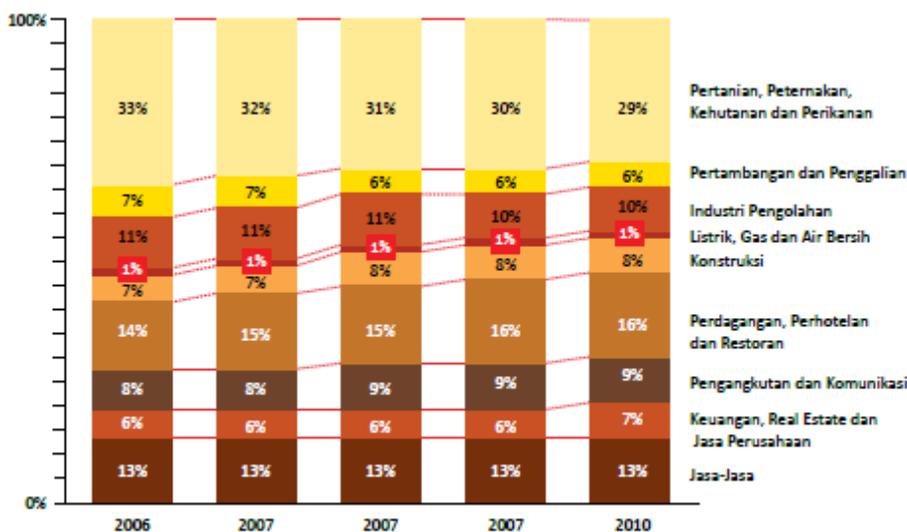
- a. Rendahnya nilai PDRB per kapita di Sulawesi dibandingkan dengan pulau lain di Indonesia;
- b. Kegiatan Ekonomi Utama Pertanian, sebagai kontributor PDRB terbesar (29,4 persen), tumbuh dengan lambat padahal Kegiatan Ekonomi Utama ini menyerap sekitar 50 persen tenaga kerja;

- c. Investasi di Sulawesi berasal dari dalam dan luar negeri relatif tertinggal dibandingkan daerah lain;
- d. Infrastruktur perekonomian dan sosial seperti jalan, listrik, air, dan kesehatan kurang tersedia dan belum memadai.

Pembangunan Koridor Ekonomi Sulawesi berfokus pada Kegiatan Ekonomi Utama Pertanian Pangan, Kakao, Perikanan, Nikel, serta Minyak dan Gas. Selain itu, Kegiatan Ekonomi Utama Minyak dan Gas Bumi dapat dikembangkan yang potensial untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di koridor ini.

Gambar 3.E.1

Proporsi PDRB Sulawesi atas dasar Harga Konstan 2010 (persen)



Sumber: BPS, 2010



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 185 -

Daya Dukung wilayah

Air. Neraca sumber daya air di Sulawesi masih menunjukkan angka positif, dimana kebutuhan air di Sulawesi saat ini mencapai 21 km³/tahun sedangkan ketersediaannya sebesar 35 km³/tahun. Namun angka tersebut menunjukkan pada kondisi yang kritis bahkan diprediksikan pada tahun 2030 mengalami defisit air. (Kementerian Lingkungan Hidup, 2011).

Energi. Total cadangan minyak di Sulawesi sebesar 49,11 MMSTB dan cadangan gas sebesar 3,83 TSCF (terbesar di Sulawesi Tenggara). Cadangan batubara di Sulawesi sebesar 233 juta ton dan potensi sumber energi terbarukan berupa panas bumi sebesar 2.519 MW (terbesar di Sulawesi Utara). (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2012).

Kesehatan. Rata-rata angka harapan hidup Sulawesi lebih tinggi dari pada rata-rata nasional dengan angka harapan hidup tertinggi yaitu 72,2 tahun di Sulawesi Utara (Kementerian Kesehatan, 2011).

Lahan. Luas daratan Sulawesi sebesar 19,2 juta Ha dengan 55 persen wilayahnya merupakan kawasan hutan (Kementerian Kehutanan, 2011). Luas lahan yang mengalami deforestasi di Sulawesi sebesar 18.749 Ha atau 2,2 persen dari total luas deforestasi di Indonesia. Selain itu, lahan kritis di koridor ini seluas 2.770.876 Ha. (Kementerian Lingkungan Hidup, 2011).

a. Pertanian Pangan

Kegiatan pertanian pangan di Sulawesi mencakup padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu. Kegiatan pertanian pangan, khususnya beras dan jagung, sangat penting, terutama untuk konsumsi domestik di Indonesia. Indonesia adalah produsen beras terbesar ketiga di dunia, yang sebagian besar dari produksinya digunakan untuk konsumsi domestik. Namun, Indonesia masih harus mengimpor 800.000 ton jagung di tahun 2010 untuk memenuhi kebutuhan domestik sebesar 5 juta ton.

Sulawesi merupakan produsen pangan ketiga terbesar di Indonesia yang menyumbang 10 persen produksi padi nasional dan 15 persen produksi jagung nasional. Pertanian pangan menyumbang 13 persen PDRB Sulawesi.

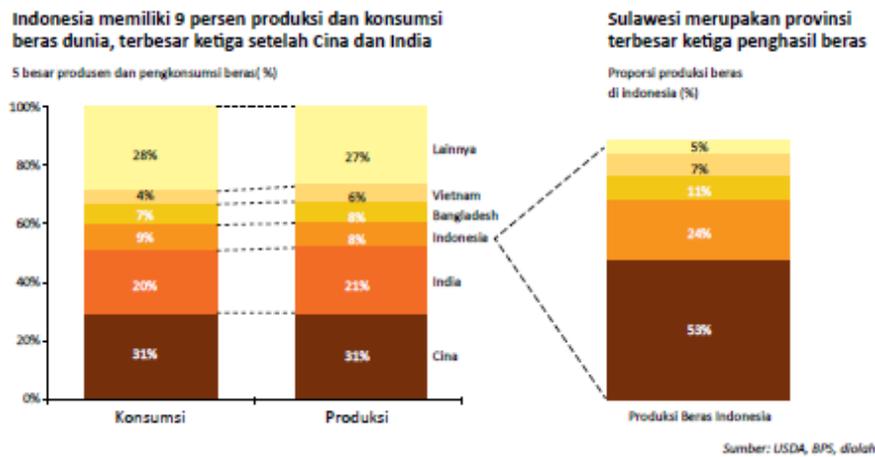


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 186 -

Gambar 3.E.2

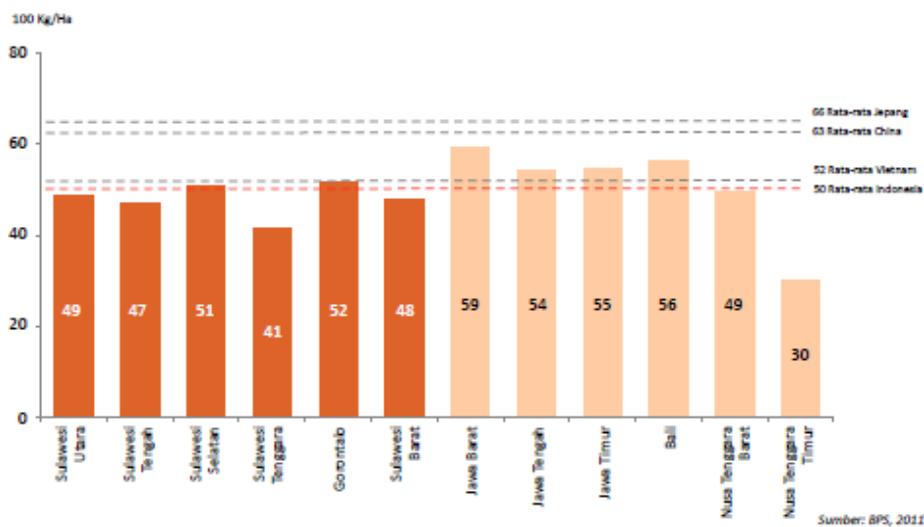
Proporsi Negara Penghasil Beras di Dunia dan Proporsi Daerah Penghasil Beras di Indonesia



Mengingat adanya keterbatasan potensi ekspansi areal pertanian, maka peningkatan produksi pangan yang paling memungkinkan adalah melakukan intensifikasi pangan. Produktivitas padi di Sulawesi masih lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.

Gambar 3.E.3

Perbandingan Produktivitas Beras Koridor Ekonomi Sulawesi dengan Wilayah Lainnya



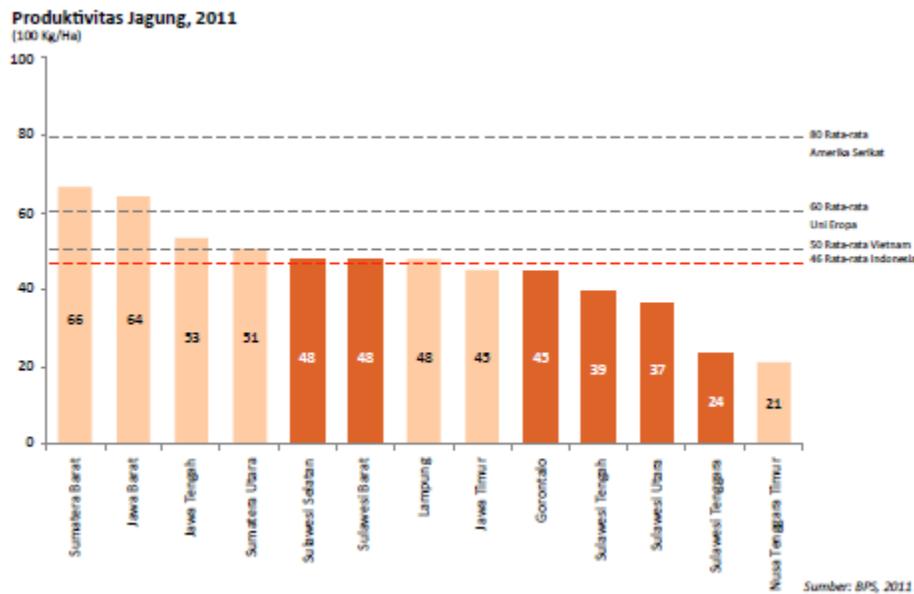
Indonesia merupakan produsen jagung terbesar di Asia Tenggara, namun kebutuhan jagung nasional belum dapat terpenuhi dari produksi domestik. Rendahnya pemenuhan kebutuhan jagung berkaitan dengan tingkat produktivitas jagung nasional. Produktivitas jagung di Sulawesi masih dibawah rata-rata produktivitas nasional.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

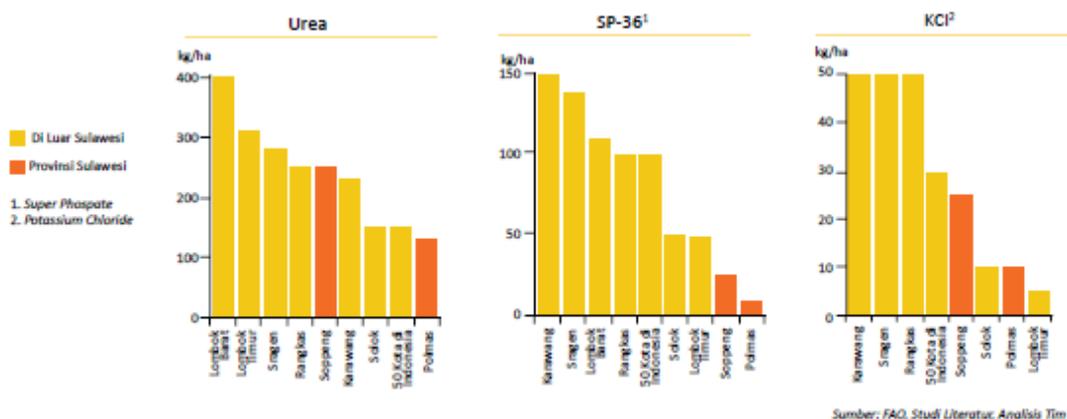
- 187 -

Gambar 3.E.4
Perbandingan Produktivitas Jagung Koridor Ekonomi Sulawesi dengan Wilayah Lainnya



Produktivitas pangan rendah disebabkan oleh penggunaan pupuk yang rendah, terbatasnya penggunaan alat pertanian, dan jaringan irigasi yang belum memadai. Penggunaan pupuk berimbang di Sulawesi berupa urea, potasium klorida (KCl), dan fosfat (SP-36) masih rendah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Hal tersebut berhubungan erat dengan faktor ketersediaan pupuk, serta biaya angkut dan pendidikan petani mengenai teknik budidaya pertanian.

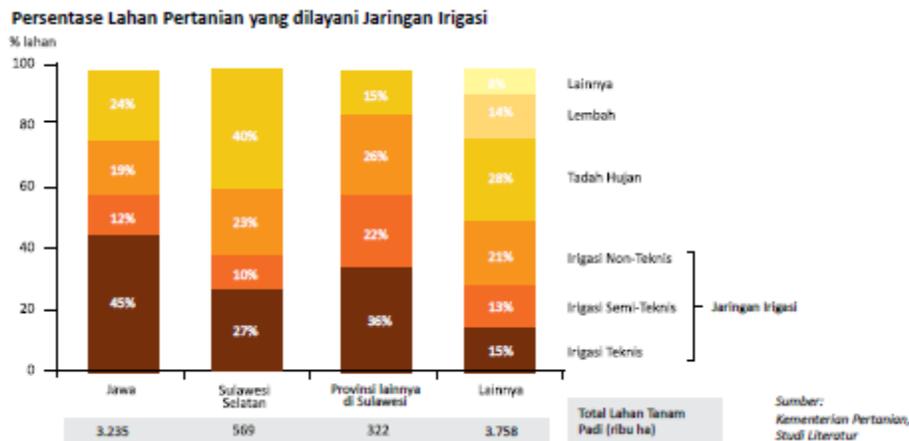
Gambar 3.E.5
Penggunaan Pupuk di Beberapa Wilayah di Indonesia



Peningkatan produktivitas lahan pertanian akan tergantung pada penggunaan alat mesin pertanian terutama bagi pengolahan lahan. Namun, Indonesia masih jauh tertinggal dalam penggunaan traktor jika dibandingkan dengan beberapa negara lain. Penggunaan alat mesin pertanian di Sulawesi relatif sangat terbatas dan ini tercermin dari penetrasi traktor yang masih sangat rendah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.

Gambar 3.E.6

Sistem Pengairan Pertanian di Indonesia



Sebagian besar jaringan irigasi di Sulawesi masih berupa irigasi sederhana dan non-teknis (hanya 37 persen lahan pertanian pangan yang telah diairi oleh irigasi teknis dan semi teknis).

1) Regulasi dan Kebijakan

Dalam rangka menghadapi berbagai tantangan tersebut di atas, diperlukan dukungan regulasi dan kebijakan berikut:

- a) Perluasan area tanam melalui optimalisasi pemanfaatan lahan, pencetakan sawah baru, rehabilitasi dan konservasi lahan pertanian;
- b) Mengamankan ketersediaan dan produksi pangan melalui pengembangan keberlanjutan lumbung pangan, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani (Gapoktan dan Koperasi);
- c) Mengurangi potensi kehilangan jumlah dan nilai pasca panen melalui peningkatan kualitas penyimpanan, pengembangan mekanisme pembelian yang efektif;
- d) Memperbaiki akses finansial/pembiayaan bagi para petani;
- e) Memantapkan kelembagaan yang menopang pemberdayaan petani dan memperbaiki fungsi koordinasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 189 -

2) Konektivitas (infrastruktur)

Pengembangan Kegiatan Ekonomi Utama Pertanian Pangan memerlukan dukungan peningkatan konektivitas (infrastruktur) berupa:

- a) Perbaikan akses jalan untuk mengurangi ketergantungan kepada pihak perantara dagang;
- b) Peningkatan fasilitas irigasi, dimana kemampuan produksi sangat rentan terhadap perubahan cuaca jika terus bergantung pada irigasi sederhana yang bergantung pada hujan;
- c) Revitalisasi dan peningkatan kapasitas gudang dan penyimpanan yang ada (saat ini BULOG membeli 5 persen produksi beras nasional, tetapi fasilitas penyimpanan yang dimiliki sudah tua dan memerlukan perbaikan) dapat meningkatkan umur pangan dalam penyimpanan dan mengurangi kerugian yang disebabkan oleh penyimpanan yang tidak baik (jumlah gudang BULOG di Sulawesi berada pada posisi kedua paling banyak di Indonesia);
- d) Peningkatan akses jalan antara lahan pertanian dan pusat perdagangan, untuk dapat memfasilitasi petani dalam melakukan penjualan dan mengurangi ketergantungan pada perantara yang menaikkan harga jual hingga 30 persen dari harga final (diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani);
- e) Pembangunan/perbaikan Jaringan Irigasi Teknis Usaha Tani (JITUT), Jaringan Irigasi Desa (JIDES), dan Tata Air Mikro (TAM), pembangunan/perbaikan pompa, sumur, embung.

3) SDM dan IPTEK

Untuk mencapai pengembangan Kegiatan Ekonomi Utama Pertanian Pangan yang lebih efektif dan efisien, diperlukan upaya:

- a) Peningkatan produktivitas melalui penggunaan teknologi tepat guna (sistem irigasi dan traktor), penggunaan pupuk berimbang yang berbasis prinsip ketepatan, dan bibit yang berkualitas/bersertifikat, serta peningkatan pengetahuan petani;
- b) Peningkatkan pendidikan mengenai pertanian bagi para petani melalui pelatihan dan bimbingan lapangan. Hal ini terwujud dalam penyelenggaraan program pelatihan padat karya produktif, padat karya infrastuktur, tenaga kerja mandiri dan teknologi tepat guna di sektor pertanian pangan di bawah tanggung jawab Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c) Penguatan dan pemberian bantuan pada SMK pertanian dan perguruan tinggi dengan prodi pertanian pangan untuk untuk mendorong peningkatan kemampuan SDM di bidang pertanian pangan;

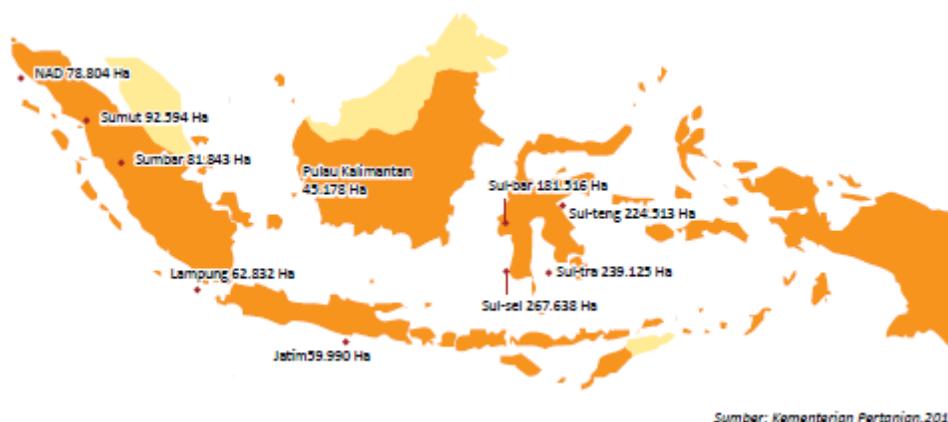
- d) Pengembangan Agro Techno Park (ATP) Minahasa Utara sebagai pusat pengembangan produk-produk hilir pertanian pangan khususnya untuk komoditas kelapa;
- e) Penguatan kerjasama antar Lembaga dan Balai-Balai penelitian terkait pertanian pangan di Koridor Ekonomi Sulawesi agar hasil-hasil riset dan pengembangan dapat dirasakan manfaatnya secara optimum oleh masyarakat, industri, maupun pemerintah;
- f) Pembentukan konsorsium bertemakan komoditi-komoditi yang termasuk ke dalam sektor pertanian pangan di Koridor Ekonomi Sulawesi sehingga keunggulan komparatif mampu ditingkatkan nilai tambahnya menjadi keunggulan kompetitif yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna teknologi;
- g) Pembentukan pusat unggulan (*center of excellence*) sereal/jagung sebagai salah satu komoditi pertanian pangan melalui insentif kelembagaan pusat unggulan yang ada bawah di Kementerian Riset dan Teknologi. Pusat unggulan ini terletak di Maros dan dengan pusat unggulan ini diharapkan dapat tercipta nilai tambah dari diversifikasi produk pangan olahan berbasis jagung.

b. Kakao

Indonesia merupakan produsen kakao ketiga terbesar dunia, dengan kontribusi 15 persen dari pasar global. Secara nasional, komoditas kakao menghasilkan devisa terbesar ketiga setelah kelapa sawit dan karet. Devisa dari kakao pada tahun 2009 mencapai USD 1,38 Miliar (berasal dari biji dan kakao olahan). Biji kakao olahan menghasilkan cocoa butter (lemak kakao) dan cocoa powder (bubuk kakao) yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dunia terutama di Amerika dan Eropa, dimana permintaan kakao mencapai 2,5 juta ton per tahun. Indonesia menargetkan pada tahun 2025 mampu memproduksi 2,5 juta ton biji kakao dengan nilai ekspor USD 6,25 Miliar.

Gambar 3.E.7

Peta Sebaran Wilayah Perkebunan Kakao di Indonesia





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 191 -

Menurut data ICCO (International Coffee and Cocoa Organization) permintaan kakao dunia terus tumbuh sekitar 2-4 persen per tahun bahkan dalam 5 tahun terakhir tumbuh 5 persen per tahun (3,5 juta ton/tahun). Negara Cina dan India dengan penduduk yang besar menjadi potensi pasar kakao dari Indonesia.

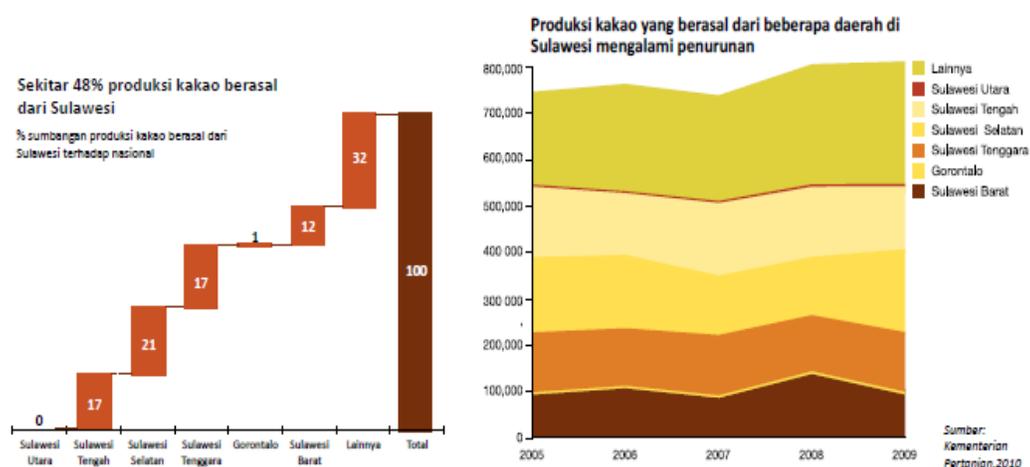
Kegiatan pengembangan perkebunan dan industri kakao bertujuan untuk meningkatkan produksi kakao (biji dan produk olahan kakao) yang berdaya saing internasional, dan mengembangkan industri kakao yang mampu memberi peningkatan pendapatan bagi para petani dan pelaku usaha kakao.

Koridor Ekonomi Sulawesi mempunyai potensi besar bagi pengembangan kegiatan kakao, baik perkebunan maupun industri pengolahan kakao. Total luas lahan kakao di Sulawesi mencapai 838.037 Ha atau 58 persen dari total luas lahan di Indonesia. Sebagian besar lahan tersebut dimiliki oleh petani (96 persen). Namun demikian, pengembangan kakao di Pulau Sulawesi menghadapi tantangan berupa kendala produksi, teknologi, kebijakan, dan infrastruktur.

Kurang tersedianya infrastruktur jalan, pelabuhan, listrik, dan gas di Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat menyebabkan pula kehilangan peluang pasar kakao sebesar 600 ribu ton yang setara dengan USD 360 juta.

Gambar 3.E.8

Kontribusi Produktivitas Kakao Sulawesi

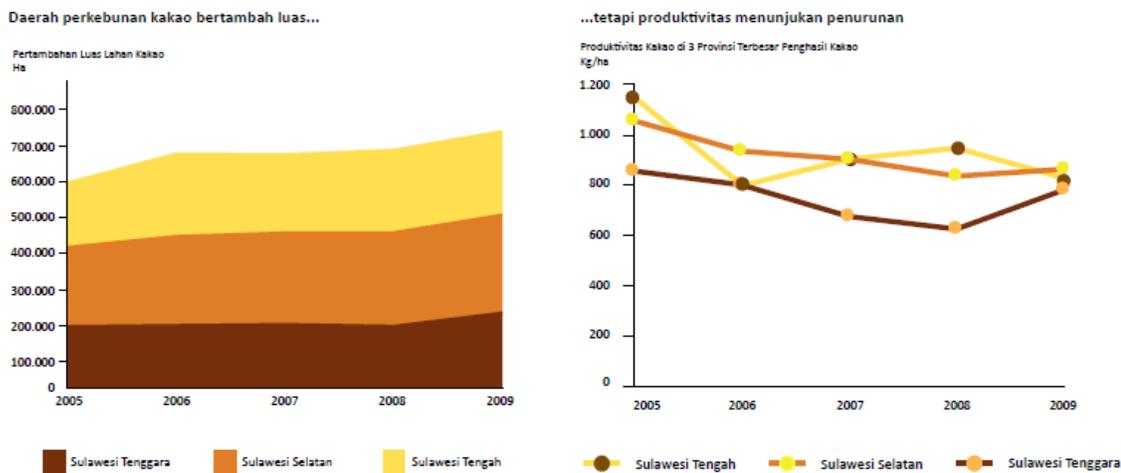


Sulawesi menyumbang 48 persen produksi kakao nasional. Produksi kakao di Sulawesi cenderung menurun, walaupun luas areal tanam meningkat. Penyebab utamanya adalah penurunan produktivitas petani kakao yang saat ini hanya 0,4-0,6 juta ton/Ha, dibandingkan dengan potensi produktivitasnya sebesar 1-1,5 Juta Ton/Ha. Penurunan produktivitas kakao berhubungan erat dengan kondisi tanaman pangan yang sudah tua, terkena serangan hama dan penyakit tanaman, rendahnya teknik budidaya pemeliharaan tanaman kakao, serta keterbatasan infrastruktur pendukung bagi kegiatan perkebunan dan industri pengolahan kakao.

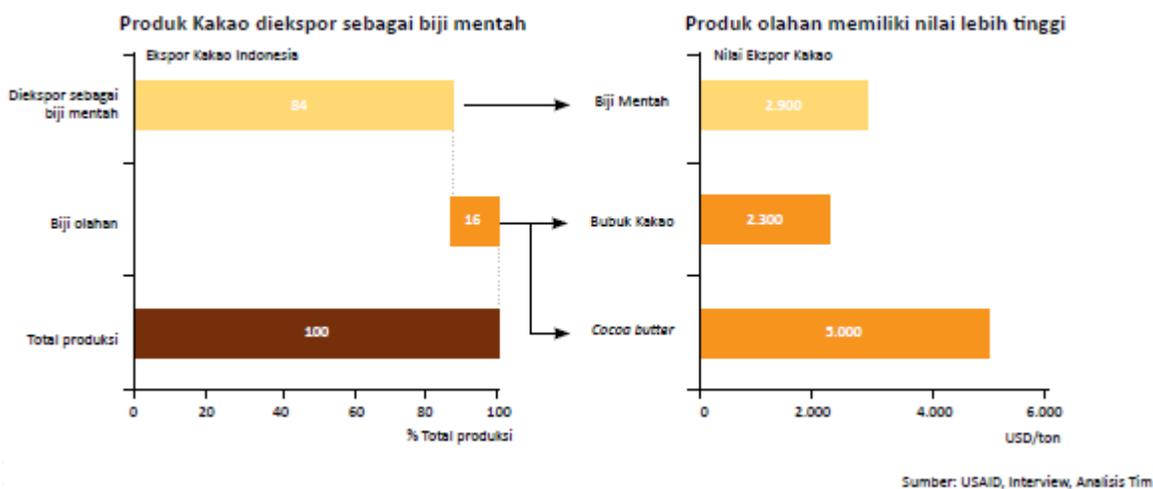
Pengembangan kegiatan kakao memiliki nilai tambah dan prospek ke depan. Rasio produksi biji mentah lebih besar daripada produksi bubuk kakao, namun secara keseluruhan produk olahan kakao memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan biji mentah. Perkembangan pasar ekspor dan meningkatnya pertumbuhan konsumsi produk kakao merupakan kesempatan yang dapat diraih dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Namun demikian, tantangan yang dihadapi berupa upaya peningkatan mutu biji kakao fermentasi dan sertifikasi, peningkatan kapasitas industri pengolahan kakao, dan peningkatan industri hilir dan tingkat konsumsi coklat.

Gambar 3.E.9

Pertambahan Luas Lahan dan Penurunan Produktivitas Kakao



Gambar 3.E.10
Produk Ekspor Kakao Indonesia



Pengembangan Kegiatan Ekonomi Utama Kakao berfokus pada peningkatan hasil rantai nilai hulu dan pengembangan industri hilir. Peningkatan produksi industri hulu diperoleh melalui:

1. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu kakao berkelanjutan;
2. Gerakan Nasional Biji Kakao Fermentasi, yaitu peningkatan mutu biji kakao melalui fermentasi dan sertifikasi;
3. Percepatan pengembangan infrastruktur pendukung pengembangan perkakaoan nasional.

Sedangkan hilirisasi Kegiatan Ekonomi Utama Kakao dilakukan melalui:

1. Peningkatan utilitas kapasitas industri pengolahan kakao yang ada;
2. Peningkatan pangsa pasar hilir di dalam dan luar negeri;
3. Penerapan standar internasional dalam rangka peningkatan mutu produk industri hilir kakao.

1) Regulasi dan Kebijakan

Dalam rangka mendukung peningkatan mutu dan hilirisasi produksi kakao, diperlukan dukungan terkait regulasi dan kebijakan berikut:

- a) Menyediakan dukungan aktif saat rehabilitasi dan peremajaan tanaman, penyediaan bibit kakao klon unggul, serta pengendalian organisme pengganggu tanaman kakao;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 194 -

- b) Melakukan peningkatan implementasi skema pembiayaan biji kakao fermentasi agar mampu menghasilkan kakao berkualitas sebagai bahan olahan (butter, powder, liquor) dan memiliki daya saing ekspor produk kakao Indonesia;
- c) Diversifikasi pasar ekspor olahan (butter, powder, liquor, dan lain-lain) yang memberi nilai tambah dalam rantai nilai kakao;
- d) Melakukan Gerakan Nasional Biji Kakao Fermentasi sebagai komitmen dan persetujuan aksi bersama peningkatan dan perbaikan produksi, produktivitas, dan mutu kakao Indonesia;
- e) Melakukan pengembangan industri dan *home industry* makanan cokelat yang menyerap produk olahan kakao;
- f) Melakukan pengkajian dan evaluasi tarif Bea Keluar terhadap produk kakao secara komprehensif dan mendalam;
- g) Melakukan evaluasi terhadap kemungkinan penghapusan diskriminasi tarif Bea Masuk kakao olahan di Eropa;
- h) Melakukan pembahasan Bea Masuk kakao olahan di beberapa negara tujuan ekspor dengan jaminan bahwa produk kakao Indonesia berstandar internasional (Codex);
- i) Membuat rantai tata niaga kakao yang efisien, sehingga petani kakao dan para pelaku industri memperoleh margin yang memadai;
- j) Menyediakan pelayanan satu pintu untuk investor;
- k) Meningkatkan pengawasan penerapan SNI wajib bubuk kakao;
- l) Menerapkan program penggunaan SNI wajib biji kakao dan sertifikasi agar terjamin sediaan hasil produksi biji kakao dan bahan olahan produk kakao berdaya saing internasional;
- m) Melakukan penerapan standar internasional produk kakao untuk membangun citra dan promosi kualitas produk kakao Indonesia yang berorientasi melindungi konsumen kakao;
- n) Melakukan peningkatan kemitraan usaha antara industri dengan Koperasi dan UKM, sehingga terjalin sinergi produksi, produktivitas, kualitas kakao, kualitas produk olahan kakao, dan pemasaran yang bernilai tambah dan bernilai manfaat bagi berbagai pelaku;
- o) Melakukan penumbuhkembangan dan penguatan kelompok tani dan koperasi kakao;
- p) Melakukan konversi areal dan tata ruang bagi pengembangan perkebunan dan industri pengolahan kakao.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 195 -

2) Konektivitas (infrastruktur)

Pengembangan Kegiatan Ekonomi Utama Kakao memerlukan dukungan peningkatan konektivitas (infrastruktur) berupa:

- a) Peningkatan kapasitas pelabuhan di Makassar dan Mamuju;
- b) Penambahan dan peningkatan kapasitas fasilitas penyimpanan di pusat-pusat perdagangan dan pelabuhan;
- c) Peningkatan akses jalan yang lebih baik dari lokasi perkebunan menuju industri pengolahan, pelabuhan, dan pusat perdagangan regional maupun ekspor;
- d) Peningkatan kapasitas infrastruktur (listrik, air, telekomunikasi, gas, dan bahan bakar alternatif) pada seluruh kawasan produksi dan industri pengolahan kakao.

3) SDM dan IPTEK

Untuk mencapai pengembangan Kegiatan Ekonomi Utama Kakao yang lebih efektif dan efisien, diperlukan upaya:

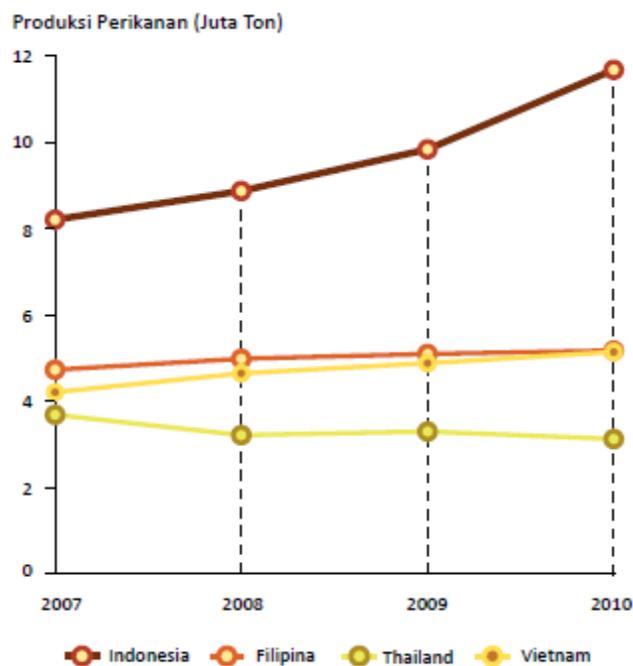
- a) Peningkatan pendidikan petani melalui fasilitasi pendidikan, pelatihan, pendampingan, penyuluhan dan diseminasi teknik budidaya dan pengolahan kakao bagi petani kakao, serta penguatan kelembagaan petani kakao secara konsisten dan berkelanjutan;
- b) Pelatihan *Good Manufacturing Practices (GMP)*, *Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)*, dan *International Organization for Standardization (ISO)* guna meningkatkan pemahaman, pengetahuan tentang kendali mutu produk kakao;
- c) Penyediaan dana riset melalui mekanisme program riset insentif bagi industri pengolahan produk kakao yang memadai serta peningkatan litbang dalam pengembangan industri kakao;
- d) Pengembangan program pelatihan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi berupa padat karya produktif, padat karya infrastruktur, tenaga kerja mandiri dan teknologi tepat guna sektor komoditi kakao di Koridor Ekonomi Sulawesi;
- e) Penyusunan masterplan pusat inovasi berbasis kakao yang diharapkan dapat menjadi wadah riset dan pengembangan pengolahan produk-produk turunan kakao yang memberikan nilai tambah bagi industri kakao di Koridor Ekonomi Sulawesi.

c. Perikanan

Indonesia memiliki kedudukan penting di Kegiatan Ekonomi Utama Perikanan. Dengan kekayaan laut yang berlimpah, saat ini pertumbuhan produksi makanan laut mencapai 7 persen per tahun, sehingga menempatkan Indonesia sebagai produsen terbesar di Asia Tenggara.

Dilihat dari produksi perikanan di Indonesia berdasarkan sebaran wilayahnya, Koridor Ekonomi Sulawesi merupakan wilayah yang memiliki produksi perikanan laut terbesar di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perikanan merupakan salah satu Kegiatan Ekonomi Utama di Koridor Ekonomi Sulawesi.

Gambar 3.E.11
Produksi Perikanan Dunia



Sumber: FAO Fisheries and Aquaculture Dept, 2011

Saat ini perikanan berkontribusi sekitar 22 persen dari total PDRB sub sektor pertanian pangan (70 persen tangkapan dan 30 persen budidaya) dimana sekitar 20 persen dari aktivitas perikanan tersebut merupakan perikanan tangkap dan sisanya adalah perikanan budidaya. Potensi pengembangan perikanan terus berkembang secara signifikan karena sebagian besar hasil perikanan di Sulawesi adalah untuk pemenuhan kebutuhan ekspor seiring dengan permintaan global yang terus meningkat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 197 -

Meskipun sumber daya perikanan cukup melimpah, terdapat persoalan terkait dengan eksploitasi penangkapan ikan yang berlebihan di beberapa areal laut sehingga mengancam keberlanjutan kegiatan ini. Sebagai contoh, eksploitasi penangkapan ikan demersal dan udang di Sulawesi Selatan dan ikan pelagis besar di Sulawesi Utara.

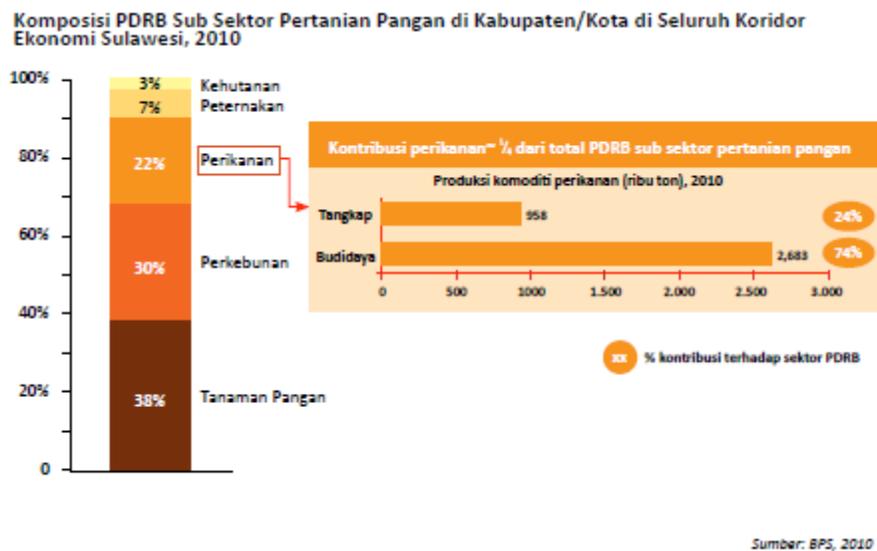
Untuk mengurangi eksploitasi penangkapan ikan yang berlebih dan meningkatkan produksi perikanan yang lebih berkelanjutan, maka dikembangkan juga perikanan budidaya (akuakultur). Dalam kaitannya dengan pengembangan perikanan budidaya, area tambak di koridor ini ideal untuk budidaya udang yang bernilai tinggi dimana nilai jualnya jauh lebih tinggi daripada nilai jual rumput laut yang mendominasi hasil produksi akuakultur. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Sulawesi Selatan telah mengutarakan keinginan untuk menjadi sentra perikanan budidaya di Indonesia.

Gambar 3.E.12

Produksi Perikanan di Wilayah Indonesia



Gambar 3.E.13
Kontribusi Perikanan Terhadap PDRB Sub Sektor Pertanian



Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka pengembangan kegiatan perikanan akan diprioritaskan pada perikanan budidaya (akuakultur). Hal ini sejalan dengan rencana pengembangan perikanan dan kelautan yang dicanangkan oleh Pemerintah. Gambar berikut menunjukkan sasaran pengembangan perikanan, dimana pengembangan perikanan budidaya ditargetkan akan melebihi dari produksi perikanan tangkap.

Tabel 3.E.1
Penangkapan Ikan Laut di Indonesia Bagian Timur

Penangkapan secara berlebihan untuk ikan pelagis besar di Sulawesi Utara dan Ikan Demersal dan Udang di Sulawesi Selatan

Badan Air	Ikan Demersal	Udang	Ikan Pelagis Kecil	Ikan Pelagis Besar
Selat Makasar	F	O	M	U
Teluk Tolo/ Laut Banda	U	U	M	M
Selat Makasar	M	-	M	F
Selat Makasar	U	-	U	O

M - Sedang (*moderate*)
 U - Tidak Pasti (*uncertain*)
 O - Eksploitasi Berlebihan (*over exploited*)
 F - Eksploitasi Seluruhnya (*fully exploited*)

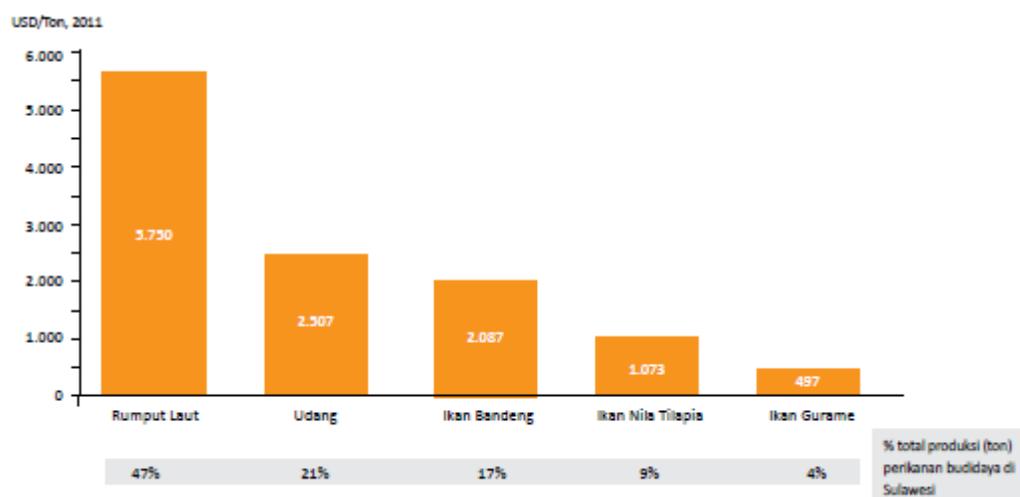
Sumber:
Indonesian Port Book, 2009

Namun demikian, secara khusus, dalam pengembangan Kegiatan Ekonomi Utama Perikanan ini ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, antara lain:

- 1) Persaingan di pasar global, dimana beberapa produk perikanan dari negara lain seperti Thailand dan Vietnam memiliki daya saing yang sangat tinggi yang dikarenakan proses produksi yang jauh lebih efisien dibandingkan dengan Indonesia;
- 2) Persaingan di pasar dalam negeri, yaitu daerah-daerah lainnya di Indonesia yang memproduksi produk perikanan sejenis;
- 3) Persyaratan kualitas/mutu produk perikanan seperti persyaratan label, kemasan, keamanan produk, traceability, green/eco label dan syarat kandungan BTP akan semakin ketat. Ini merupakan suatu tantangan ke depan agar industri perikanan dapat lebih meningkatkan mutu dan memperketat kontrol kualitas produk perikanan yang dihasilkan;
- 4) Persaingan konsumsi protein hewani lain, seperti ayam, daging (sapi), dan telur;
- 5) Pendapatan dan daya beli konsumen. Dengan semakin meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat akan mempengaruhi pola konsumsi makanan yang lebih sehat. Masyarakat cenderung untuk membeli bahan pangan dan hasil perikanan yang telah diolah dan dikemas dalam bentuk yang lebih mewah. Ini merupakan suatu tantangan dan sekaligus peluang usaha industri pengolahan hasil perikanan, misalnya pengembang inovasi produk siap saji, produk beku, produk kaleng, produk kering, dan value added seafood (fillet kakap, tuna loin steak).

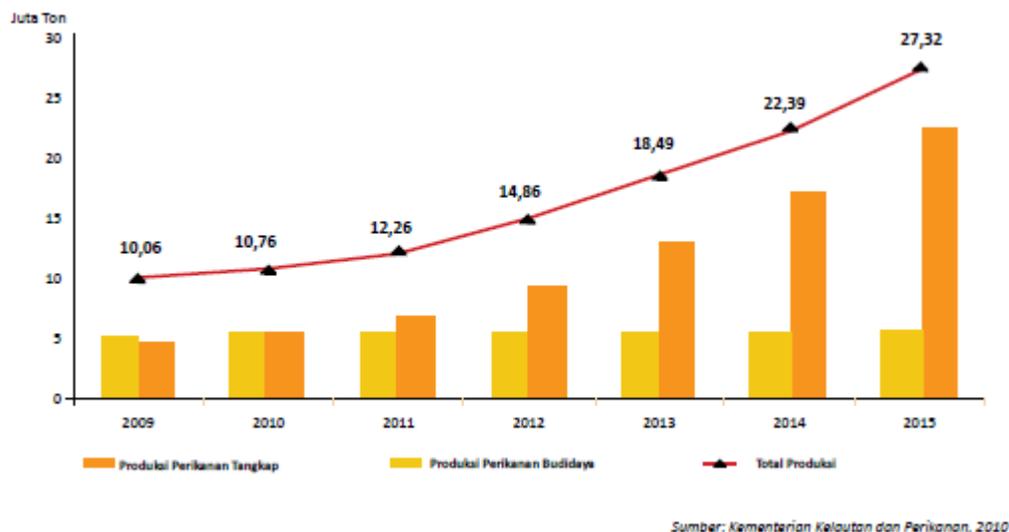
Gambar 3.E.14

Produktivitas Perikanan Budidaya di Sulawesi



Sumber: Statistik Kelautan dan Perikanan, 2011

Gambar 3.E.15
Sasaran Produksi Perikanan Nasional 2011 – 2015



1) Regulasi dan Kebijakan

Berdasarkan potensi dan tantangan pengembangan kegiatan perikanan tersebut di atas, diperlukan dukungan terkait regulasi dan kebijakan berikut:

- a) Meningkatkan nilai tambah produk dengan pengadaan subsidi konversi lahan untuk pembuatan tambak/ budidaya udang;
- b) Meningkatkan aktivitas pengolahan rumput laut;
- c) Mengembangkan minapolitan berbasis perikanan tangkap untuk percepatan pembangunan kawasan yang berbasis perikanan tangkap dan minapolitan berbasis perikanan budidaya;
- d) Mengembangkan sistem pengaturan dan pengawasan yang lebih ketat mengenai aktivitas penangkapan ikan;
- e) Melakukan konversi areal bakau menjadi tambak udang sesuai persyaratan yang berlaku;
- f) Penegakan peraturan terkait kualitas/mutu produk perikanan secara lebih baik.

2) Konektivitas (infrastruktur)

Pengembangan Kegiatan Ekonomi Utama Perikanan memerlukan dukungan peningkatan konektivitas (infrastruktur) berupa:

- a) Pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan;
- b) Peningkatan kapasitas pelabuhan di Makassar dan Manado;



- 201 -

- c) Akses jalan yang lebih baik dari lokasi perikanan menuju pelabuhan dan pusat perdagangan regional;
- d) Pembangunan fasilitas penyimpanan hasil laut, di tempat-tempat pelelangan maupun di pusat-pusat perdagangan;
- e) Peningkatan kapasitas infrastruktur (listrik, air, telekomunikasi, dan pasokan bahan bakar).

3) SDM dan IPTEK

Untuk mencapai pengembangan Kegiatan Ekonomi Utama Perikanan yang berkelanjutan, diperlukan upaya-upaya:

- a) Peningkatan produktivitas penangkapan dan pengolahan melalui pelatihan dan penyuluhan untuk perbaikan
- b) Edukasi nelayan, memperluas akses terhadap finansial, dan pengadaan modal serta alih teknologi tepat guna;
- c) Penyediaan pendidikan kepada nelayan perlu dilakukan untuk memastikan penggunaan metode penangkapan yang lebih baik guna menjaga kelangsungan produksi perikanan. Seperti pada komoditi rumput laut, Kementerian Perikanan dan Kelautan menyediakan anggaran khusus untuk pelatihan penanaman dengan metode Long Line, pemanenan, pengolahan dan pemasaran rumput laut;
- d) Penegakkan peraturan terkait kualitas/mutu produk perikanan secara lebih baik;
- e) Pemberian bantuan dana (subsidi) terutama bagi petani pemula budi daya udang;
- f) Peningkatan standar proses industri, terutama untuk produk ekspor sehingga dapat mencapai nilai yang optimal;
- g) Pembangunan pusat unggulan perikanan tangkap sebagai wadah pengembangan teknologi pengolahan pangan berbasis ikan tangkap. Produk unggulan diantaranya ikan tuna, cakalang dan udang. Pusat unggulan ini dikembangkan atas kerjasama Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- h) Pembangunan pusat unggulan perikanan budidaya untuk peningkatan teknologi pembudidayaan dan pengolahan pangan berbasis ikan budidaya. Produk unggulan diantaranya bandeng, udang dan rumput laut;
- i) Pendirian pusat riset dan inovasi kelautan (Marine Center) sebagai pengembangan iptek kelautan nasional.



- 202 -

d. Nikel

Indonesia adalah produsen nikel terbesar pertama dari 5 besar negara produsen nikel dunia yang bersama-sama menyumbang lebih dari 65 persen produksi nikel dunia. Produksi nikel Indonesia mencapai 290 ribu ton per tahun. Indonesia memiliki 8 persen cadangan nikel dunia, oleh karena itu industri pertambangan dan pengolahan nikel sangat layak untuk dipercepat dan diperluas pengembangannya. Sulawesi merupakan daerah dengan produksi nikel paling maju di Indonesia. Pertambangan nikel di Sulawesi menyumbang sekitar 6 persen terhadap PDRB Sulawesi. Oleh karenanya, kegiatan pertambangan di Koridor Ekonomi Sulawesi terfokus pada pertambangan nikel yang merupakan potensi pertambangan terbesar di koridor ini. Sulawesi memiliki 50 persen cadangan nikel di Indonesia dengan sebagian besar untuk tujuan ekspor, diikuti oleh Maluku dan Papua.

Akibat resesi global, permintaan nikel sempat menurun dalam kurun waktu tahun 2006 – 2008. Namun demikian, permintaan nikel kembali meningkat mulai tahun 2010 untuk memenuhi kebutuhan Cina dan Taiwan yang semakin besar. Diperkirakan harga jual nikel pun akan mencapai USD 7,8 per pon pada tahun 2013, setelah mencapai titik terendah pada tahun 2009, yakni USD 6,7 per pon.

Di koridor ini juga terdapat penambangan komoditas pertambangan lainnya yaitu emas, tembaga dan aspal namun tidak terlalu signifikan dibandingkan potensi bijih nikel. Emas dan aspal lebih bersifat pengoptimalan produksi, sedangkan komoditas tembaga berupa kegiatan pembangunan smelter dan bukan penambangannya. Untuk pengembangan smelter tembaga di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, pasokan bahan baku bijih tembaga dari luar Koridor Ekonomi Sulawesi direncanakan berasal dari Papua dan dari Nusa Tenggara.

Empat lokasi penting di Sulawesi yang memiliki cadangan nikel berlimpah adalah:

1. Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan;
2. Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah;
3. Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara;
4. Kabupaten Konawe Utara , Sulawesi Tenggara.

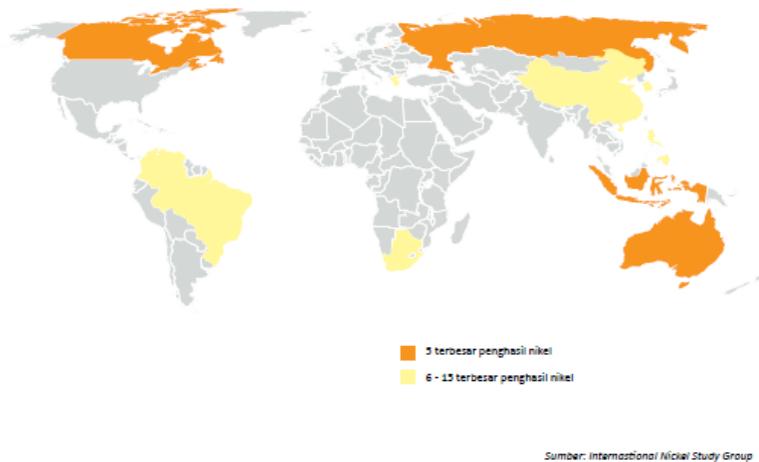


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

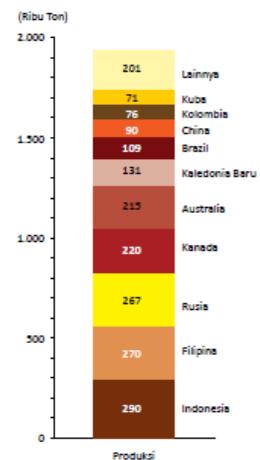
- 203 -

Gambar 3.E.16
Sumber Nikel Dunia

Daerah Penghasil Nikel
Tersebar Secara Geografis

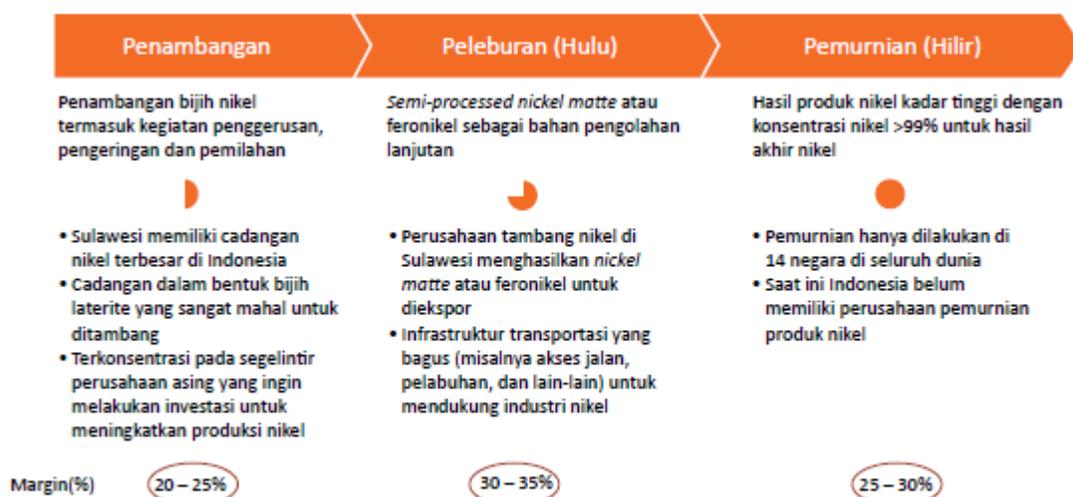


Produksi Tambang Nikel
Berdasarkan Negara (2011)



Tantangan terbesar dalam percepatan dan perluasan kegiatan pertambangan nikel adalah menciptakan industri hilir dari pertambangan nikel khususnya dalam pemurnian (*refining*) hasil produksi nikel. Indonesia belum memiliki fasilitas pemurnian nikel padahal kegiatan pemurnian memberikan nilai tambah yang sangat tinggi.

Gambar 3.E.17
Rantai Nilai Pertambangan Nikel



Sumber: Laporan Tahunan Perusahaan, Analisis Tim

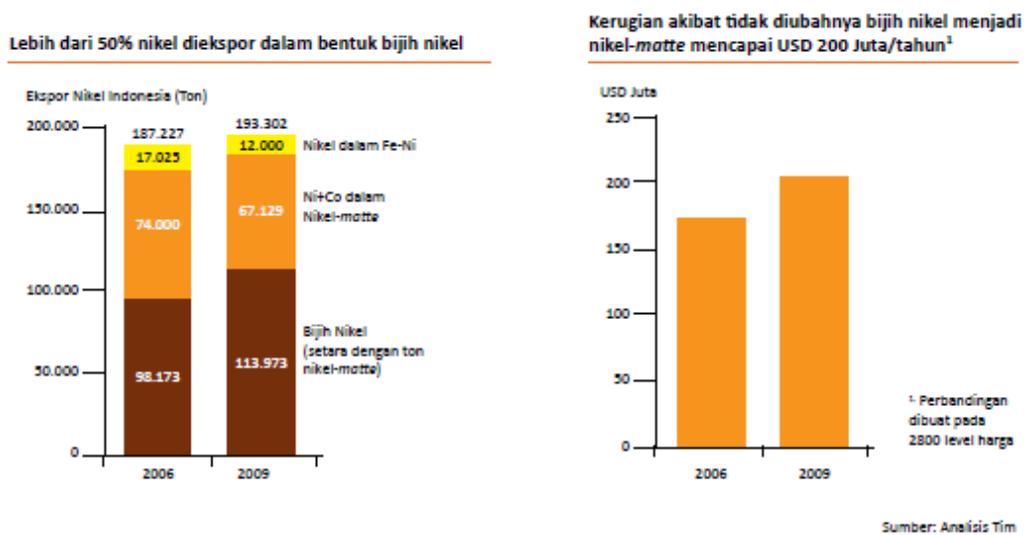


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 204 -

Saat ini, lebih dari 50 persen nikel yang diekspor adalah dalam bentuk bijih nikel. Dari 190 ribu ton bijih nikel yang diproduksi Indonesia per tahunnya, hanya sekitar 80 ribu ton nikel yang diekspor dalam bentuk nikel matte (hasil olahan bijih nikel dengan kandungan nikel di atas 75 persen). Dengan tidak dilakukannya tahap pengolahan lanjut terhadap bijih nikel tersebut, Indonesia kehilangan potensi pertambahan nilai produk nikel hingga mencapai USD 200 Juta per tahun.

Gambar 3.E.18
Ekspor Nikel Indonesia



Kendala lain dalam pertambangan nikel adalah terhambatnya peningkatan tahap kegiatan eksplorasi menjadi tahap operasi dan produksi atau pembukaan area baru karena tumpang tindih tata guna lahan, lambatnya penerbitan rekomendasi dari pemerintah daerah yang biasanya terkait dengan lambatnya pengurusan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan juga penerbitan Ijin Usaha Pertambangan.

Selain itu, beberapa tantangan investasi di pertambangan nikel terutama bagi perusahaan tambang asing, antara lain adalah masalah ketidakjelasan regulasi yang mengatur retribusi daerah yang belum konsisten antara pemerintah pusat dan daerah.

Di lain pihak, pertambangan nikel pun menimbulkan beberapa masalah lingkungan seperti polusi udara, penurunan kualitas tanah, dan gangguan ekosistem, disamping tantangan sosial berupa banyaknya imigran dari luar area pertambangan, serta permasalahan terkait sengketa tanah, terutama tanah adat. Hal ini menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan strategi utama pengembangan industri nikel yaitu meningkatkan kegiatan investasi pertambangan nikel yang memenuhi aspek lingkungan, keselamatan kerja dan aspek sosial.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 205 -

1) Regulasi dan Kebijakan

Untuk menjawab masalah dan tantangan pengembangan Kegiatan Ekonomi Utama Nikel di atas, diperlukan dukungan terkait regulasi dan kebijakan berikut:

- a) Penyederhanaan peraturan dan birokrasi (antar lembaga dan kementerian) untuk mempermudah kegiatan memulai dan mengoperasikan pertambangan;
- b) Perbaikan kelembagaan untuk membuat investasi di pertambangan nikel lebih menarik, karena pada saat ini terdapat inefisiensi dalam hal akuisisi tambang, pembuatan kontrak, Izin Usaha Pertambangan (IUP), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan sebagainya;
- c) Perbaikan peraturan terkait pertanahan dan memperjelas tata guna lahan melalui tata ruang;
- d) Dukungan Pemerintah berupa pemberian insentif kepada investor industri padat modal.

2) Konektivitas (infrastruktur)

Pengembangan Kegiatan Ekonomi Utama Nikel memerlukan dukungan peningkatan konektivitas (infrastruktur) berupa:

- a) Pembangkit listrik (ketersediaan energi) untuk memenuhi kebutuhan pemrosesan;
- b) Akses jalan antara areal tambang dan fasilitas pemrosesan;
- c) Infrastruktur pelabuhan laut yang dapat melayani pengiriman peralatan dan bahan baku dari daerah lain, misalnya dari Papua - Kepulauan Maluku.

3) SDM dan IPTEK

Pengembangan Kegiatan Ekonomi Utama Nikel juga memerlukan dukungan dari sisi SDM dan Iptek melalui:

- a) Pelatihan peningkatan nilai tambah bijih nikel sebagai upaya dalam mencapai standar batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang mineral termasuk sisa dan produk sampingan;
- b) Pembentukan konsorsium antar lembaga sebagai sarana pengembangan teknologi pengolahan komoditas tambang mineral termasuk nikel, program ini dapat diselenggarakan melalui insentif Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa (PKPP);
- c) Penyelenggaraan program pelatihan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi berupa program padat karya produktif, padat karya infrastruktur, tenaga kerja mandiri dan teknologi tepat guna untuk komoditas tambang mineral nikel di Koridor Ekonomi Sulawesi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 206 -

e. Minyak dan Gas Bumi

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak dan gas bumi (migas) di dunia. Potensi migas Indonesia tersebar secara merata hampir di seluruh wilayah Indonesia. Untuk minyak bumi, potensi cadangan terbesar berada di Provinsi Riau sedangkan gas alam berada di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Selain di kedua provinsi tersebut potensi migas tersebar di wilayah-wilayah lain di Indonesia, seperti di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Koridor Ekonomi Sulawesi mempunyai potensi minyak dan gas bumi yang belum teridentifikasi dan tereksplorasi dengan baik. Industri minyak dan gas bumi memiliki potensi untuk berkembang di Pulau Sulawesi namun menghadapi tantangan berupa kontur tanah dan laut dalam. Hal ini menyebabkan tingkat kesulitan teknis yang tinggi yang berujung pada tingginya biaya eksploitasi migas di Sulawesi.

Potensi minyak bumi Koridor Ekonomi Sulawesi relatif kecil dibandingkan wilayah lain Indonesia dengan cadangan sebesar 49,78 MMSTB dari total 7.998,49 MMSTB cadangan minyak bumi Indonesia, atau hanya 0,64 persen dari total cadangan Indonesia.

Sedangkan potensi gas bumi Koridor Ekonomi Sulawesi juga relatif tidak besar dibandingkan wilayah lain Indonesia dengan cadangan sebesar 4,23 TSCF dari total 157,14 TSCF cadangan gas bumi Indonesia, atau hanya 2,69 persen dari total cadangan Indonesia.

Terlihat jelas bahwa cadangan minyak dan gas bumi di Koridor Ekonomi Sulawesi tergolong kecil, namun harus tetap diperhitungkan mengingat cadangan minyak Indonesia terus mengalami penurunan terutama yang terdapat di wilayah barat Indonesia.

Kegiatan Ekonomi Utama Migas di Koridor Ekonomi Sulawesi akan terpusat pada beberapa lokasi berikut:

1. Area eksploitasi gas bumi di Donggi Senoro, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah
2. Area eksploitasi minyak bumi di Kabupaten Luwuk, Sulawesi Tengah
3. Area eksploitasi gas bumi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat
4. Area eksploitasi gas bumi di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan
5. Area eksploitasi gas bumi di Lahendong, Sulawesi Utara
6. Lapangan Migas Karama, Sulawesi Barat

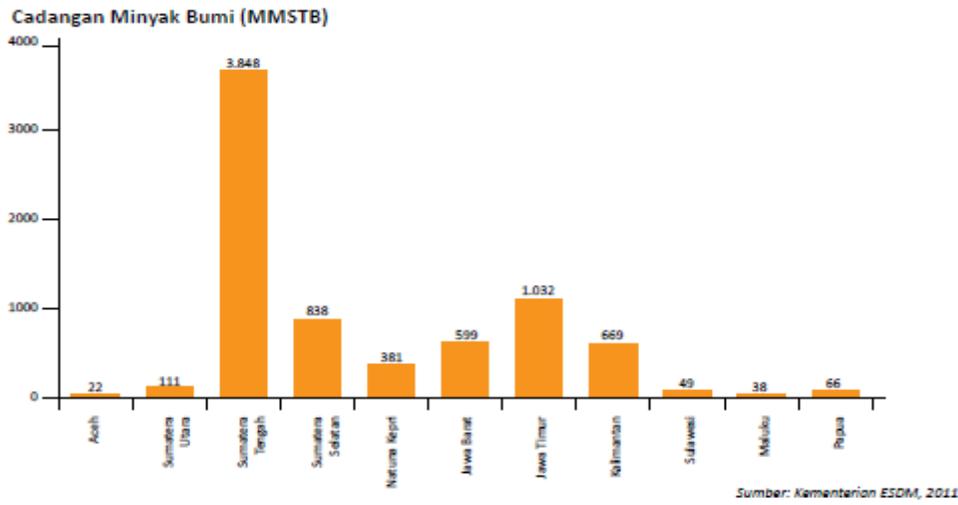


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 207 -

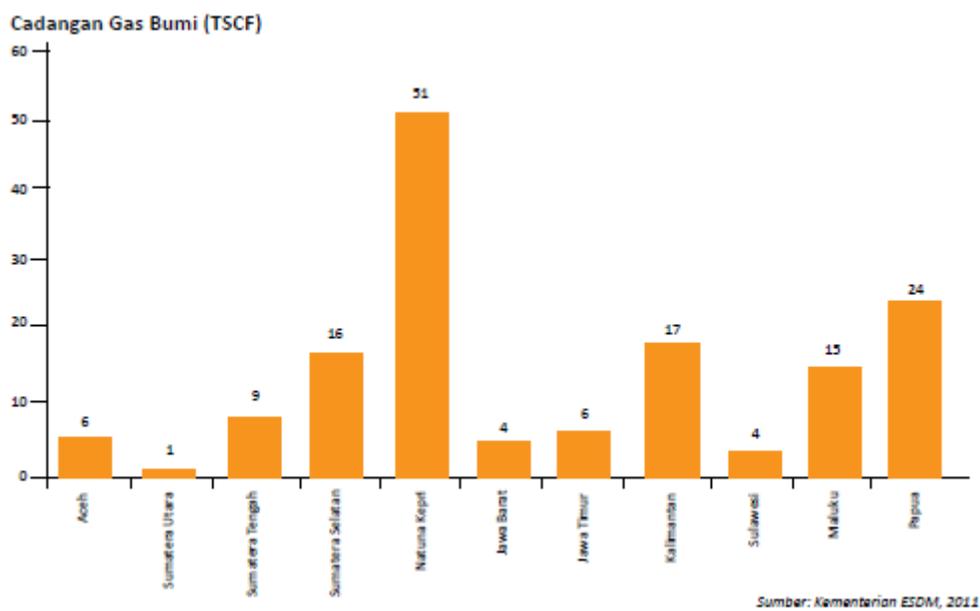
Gambar 3.E.19

Cadangan Minyak Bumi di Sulawesi dan Wilayah Lain Indonesia



Gambar 3.E.20

Cadangan Gas Bumi di Sulawesi dan Wilayah Lain Indonesia





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 208 -

1) Regulasi dan Kebijakan

Upaya pengembangan Kegiatan Ekonomi Utama Migas, diperlukan dukungan terkait regulasi dan kebijakan berikut:

- a) Optimalisasi produksi migas melalui peningkatan kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi setempat;
- b) Penyediaan iklim investasi yang positif dan penyempurnaan beberapa perundang-undangan dan perizinan migas;
- c) Peningkatan sinergitas pemerintah dengan pemangku kepentingan terkait;
- d) Pemberian insentif untuk pembangunan kilang dalam negeri;
- e) Peningkatan kemudahan bagi investor dalam menjalankan kegiatan usahanya;
- f) Peningkatan informasi ketersediaan minyak dan gas bumi.

2) Konektivitas (infrastruktur)

Pengembangan Kegiatan Ekonomi Utama Migas memerlukan dukungan peningkatan konektivitas (infrastruktur) berupa:

- a) Peningkatan dan pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan bakar gas;
- b) Peningkatan dan pengembangan akses ke daerah-daerah eksplorasi dan eksploitasi baru, baik di daratan maupun di lepas pantai;
- c) Pembangunan infrastruktur pengilangan migas;
- d) Pembangunan fasilitas penimbunan bahan bakar.

3) SDM dan IPTEK

Untuk mencapai pengembangan Kegiatan Ekonomi Utama Migas yang efektif dan efisien, diperlukan upaya-upaya penerapan teknologi baru eksploitasi minyak dan gas bumi yang berbiaya rendah. Upaya tersebut salah satunya diwujudkan dalam pembentukan konsorsium antar lembaga sebagai sarana pengembangan teknologi eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas di Koridor Ekonomi Sulawesi. program ini dapat diselenggarakan melalui insentif Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa (PKPP).

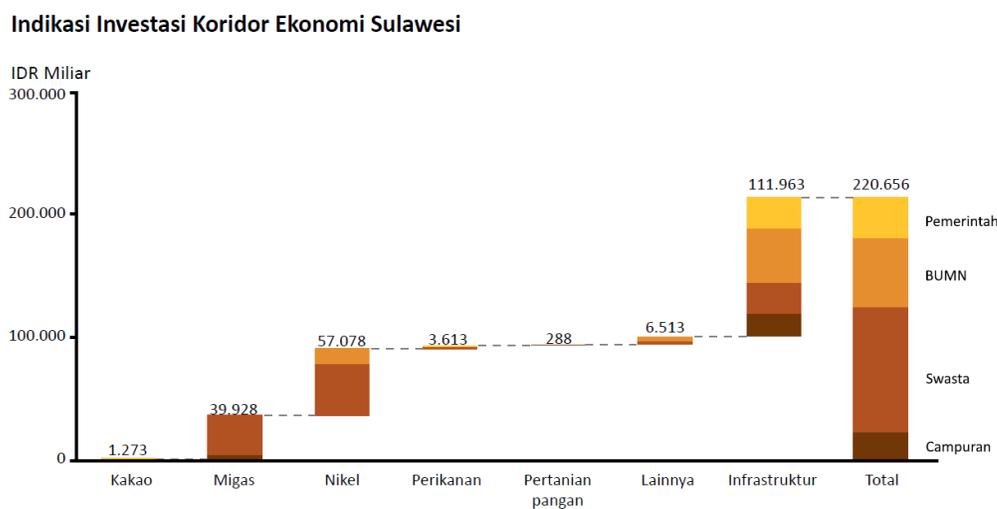
f. Kegiatan Ekonomi Lain

Selain Kegiatan Ekonomi Utama yang menjadi fokus Koridor Ekonomi Sulawesi di atas, di koridor ini juga terdapat beberapa kegiatan yang dinilai mempunyai potensi pengembangan, seperti Tekstil, Makanan - Minuman, Tembaga, Perakayuan, Kelapa Sawit, Besi Baja, Karet dan Pariwisata yang difokuskan pada lima Destinasi Pariwisata Nasional. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat juga berkontribusi di dalam pengembangan Koridor Ekonomi Sulawesi secara menyeluruh.

2) Investasi

Terkait dengan pembangunan Koridor Ekonomi Sulawesi telah diidentifikasi rencana investasi baru untuk Kegiatan Ekonomi Utama Pertanian Pangan, Kakao, Perikanan, Pertambangan Nikel dan Migas serta infrastruktur pendukung sekitar IDR 220.656 Miliar. Mayoritas rencana investasi tersebut terkait dengan Kegiatan Ekonomi Utama Nikel. Berikut ini adalah gambaran umum investasi yang ada di Koridor Ekonomi Sulawesi:

Gambar 3.E.21
Indikasi Investasi Koridor Ekonomi Sulawesi



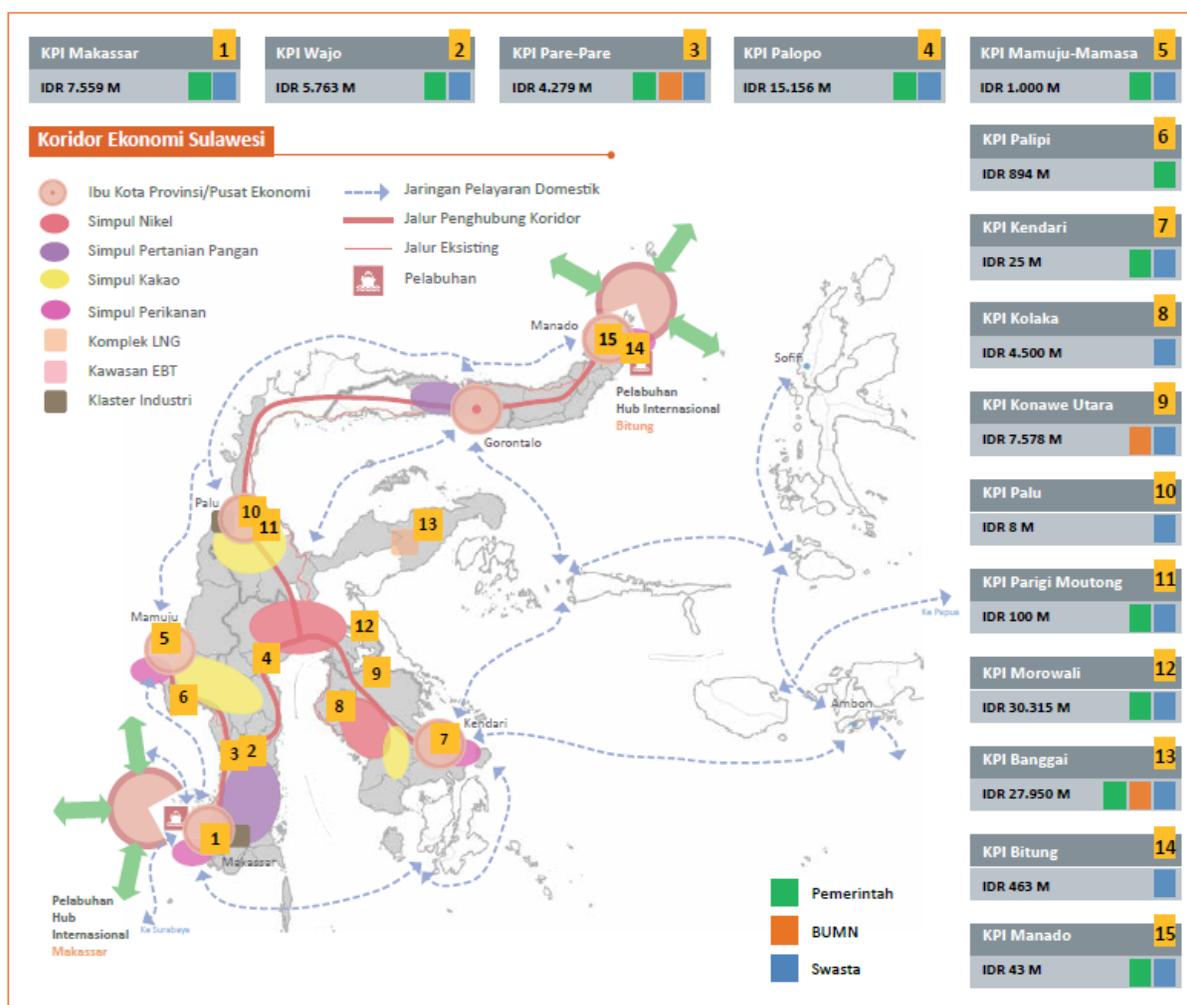
Sumber: Analisis Tim, 2013

Inisiatif investasi yang berhasil teridentifikasi tersebut dihimpun dari dana Pemerintah, Swasta dan BUMN serta campuran dari ketiganya.

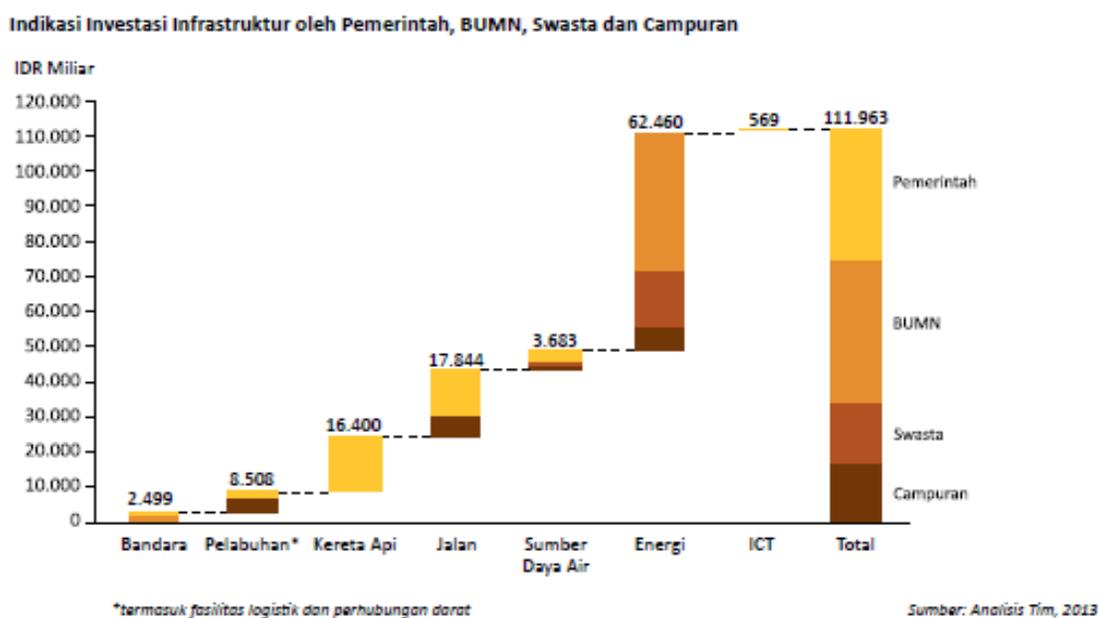
Di samping investasi di atas, ada pula beberapa investasi untuk kegiatan yang bukan menjadi Kegiatan Ekonomi Utama di Koridor Ekonomi Sulawesi, tetapi menjadi bagian dari 22 Kegiatan Ekonomi Utama seperti Tekstil, Makanan - Minuman, Tembaga, Perakayuan, Kelapa Sawit, Besi Baja, Karet dan Pariwisata yang difokuskan pada lima Destinasi Pariwisata Nasional. Selain itu, ada pula investasi dari beberapa kegiatan di luar 22 Kegiatan Ekonomi Utama yang dikembangkan di MP3EI seperti Tanaman Jarak, Kimia Dasar Anorganik, Pupuk, Industri Marmer, Industri Cat, Emas, Semen, Aspal, *Molybdenum* dan Kawasan Industri.

Gambar 3.E.22

Peta Kawasan Perhatian Investasi (KPI) Prioritas Koridor Ekonomi Sulawesi



Gambar 3.E.23
 Indikasi Investasi Infrastruktur oleh Pemerintah,
 BUMN, Swasta dan Campuran



Dalam jangka panjang, diperlukan upaya konsisten untuk membangun industri hilir pertambangan dan hasil perkebunan. Hilirisasi industri diiringi pemasaran secara sinergis dan strategis akan menghasilkan pertambahan nilai optimal di dalam koridor yang berimplikasi pada perluasan lapangan kerja dan peningkatan daya saing produk yang dihasilkan.

Pembangunan struktur ruang diarahkan pada pemahaman pola pergerakan barang dari hasil perkebunan (kakao) maupun tambang nikel, dan migas, menuju tempat pengolahan dan atau kawasan industri, yang berlanjut menuju ke pelabuhan. Untuk itu, penentuan prioritas dan kualitas pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan di setiap provinsi diarahkan untuk melayani angkutan barang di sepanjang jalur konektivitas ekonomi di provinsi yang bersangkutan. Demikian pula pembangunan infrastruktur air dan energi dilakukan untuk mendukung produksi pertanian pangan, kakao, maupun pertambangan yang ada di setiap provinsi, yang berujung pada peningkatan manfaat dan nilai tambah produk yang dihasilkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 212 -

Pembangunan struktur ruang Koridor Ekonomi Sulawesi akan berkembang sejalan dengan pembangunan dan keberadaan jalan raya Trans Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi bagian selatan hingga utara. Struktur ruang koridor ini mengalami dinamika yang tinggi seiring dengan percepatan pergerakan barang dan orang dari intra dan inter pusat-pusat pertumbuhan di dalam Koridor Ekonomi Sulawesi maupun antar Koridor Ekonomi Sulawesi dengan koridor ekonomi lainnya di Indonesia. Selain itu, mengingat bahwa koridor ini berada di sisi Samudra Pasifik dan jalur pelayaran internasional, maka sangat penting untuk dapat menentukan lokasi yang akan berfungsi sebagai hub internasional. Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara, atau Pelabuhan Makassar di Sulawesi Selatan merupakan pelabuhan yang dapat dikembangkan menjadi hub internasional. Penetapan hub internasional di Kawasan Timur Indonesia diharapkan dapat mempercepat pembangunan di Indonesia Timur yang lebih didominasi oleh pulau-pulau.